PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Windah Shindy Sihombing¹, Petrus Irwan Panjaitan², Radisman Saragih³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The crime of obscenity is one of the crimes in the sexual field that is very disturbing to the community, this is also contrary to the Government's goal to create a safe, peaceful and prosperous society. Therefore, the authors are interested in conducting research to find out how law enforcement and criminal responsibility of children against children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse are based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 18/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Jkt.Tim. So specifically that regulates law enforcement and accountability for criminal acts of sexual harassment against minors, there are regulations that regulate it apart from the Criminal Code (KUHP), namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the problem in this thesis is about law enforcement and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of obscenity. The author uses two theories, namely Law Enforcement Theory and Responsibility Theory. Using normative legal research methods. Legal materials are sourced from primary data and secondary data.*

Keywords: *Crime, Violence, Sexual, Victim, Children as Abusers*

How to Site: Windah Shindy Sihombing, Petrus Irwan Panjaitan, Radisman Saragih (2022). Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 284-293. DOI.10.55809

Introduction

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. "Kerugian ini dapat berupa rasa

terauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat". Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang- undang Perlindungan Anak.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Sedangkan pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Ayat (15a) pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya tindak pidana pencabulan ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” Namun dalam hal perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak dibawah umur maka hal tersebut diatur dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih

terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Untuk itu maka perlu dilakukan upaya perlindungan, dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak (pidana) ini, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum. Ketika anak melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo 82 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Anak Korban, yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat Dakwaan ini tanpa ada penyangkalan dari para Saksi maupun oleh Anak, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subyek (*error in persona*) yang telah diajukan dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum: Bahwa pada sekira bulan Januari 2018 setelah pelajaran olah raga saat kelas 8C kosong di SMP XXX, saat Anak Korban sedang duduk-duduk bersama temannya tiba-tiba ABH nyamperin, mau minjam catatan IPA, lalu ABH menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke lantai 2 ke ruang kelas 8C. Di dalam kelas hanya ada Anak Korban dan Anak, lalu Anak berusaha memeluk Anak Korban dan karena takut Anak Korban berteriak minta tolong lalu datang Pak XXX masuk ke dalam kelas dan dikira Anak Korban Pak XXX mau menolong Anak Korban tapi Pak XXX malah mematikan lampu serta menutup gorden, lalu Pak XXX mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban ke lantai hingga posisi Anak Korban terlentang di lantai. Kemudian Celana Anak Korban diturunkan oleh Pak XXX sampai sedengkul, dan Pak XXX nurunin celananya sendiri sampai kelihatan kemaluannya, lalu kemaluannya dimasukan ke kemaluan Anak Korban sambil pantatnya digoyang-goyangkan sekitar 5 menit, lalu ke luar cairan putih, sehingga Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya Pak XXX minta bantuan Anak XXX dengan mengatakan "XXX bantuin pegangin tangan" lalu XXX memegangi tangan kiri Anak Korban sambil satu tangan yang lain membekap mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, lalu Pak XXX menindih badan Anak Korban dengan posisi Pak XXX di atas dan Anak Korban di bawah;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Pak XXX menyuruh XXX gantian, lalu XXX menarik Anak Korban untuk duduk di bangku, kemudian dengan posisi Anak Korban duduk di bangku dan celana dalam Anak Korban masih sebatas lutut, Pak XXX dengan tangan kanannya memnegangi tangan kiri Anak Korban dan tangan kiri Pak XXX membekap mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa yang dilakukan ABH terhadap Anak Korban yaitu memasukkan jarinya ke lubang kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) jari yaitu jari tengah dan jari telunjuk hingga Anak Korban kesakitan;

Menimbang, bahwa setelah selesai Pak XXX mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang ke guru yang lain dan sama orang tua ya, kalo sampe bilang kamu gak bakal lulus dan ranking kamu bakal turun", lalu Pak XXX menyalakan lampu ruang kelas dan meninggalkan ruang kelas, lalu XXX mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang ke orang tua lu ya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka adanya unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban masih berumur 14 tahun yang mana XXX lahir 13 Juli 2004 atau belum berumur 18 tahun yaitu masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif di mana apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti di mana berdasarkan fakta di persidangan adanya unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo 82 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaat, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat terhadap Pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan.

Dalam Amar Putusannya Hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere Jakarta Selatan dan

mengikuti pelatihan Kerja dengan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos olahraga lengan panjang berwarna hijau milik XXX
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau milik XXX

Dikembalikan kepada saksi korban Nabila XXX;

4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa Anak terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa dalam perkara No. 18/ Pid.Sus-Anak/2020/ PN Jkt Tim, Pasal 82 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat unsur tindak pidana. Selain itu, pertimbangan hukum hakim sudah tepat apabila sanksi dijatuhkan dalam perkara No. 18/ Pid.Sus-Anak/2020/ PN Jkt Tim dari segi masalah Anak. Tindakan Anak menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban dan keluarga korban, seperti trauma dan penghinaan, yang kemudian terkait dengan penuntutan jaksa.

Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Penulis berpendapat bahwa, dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindung. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membuiuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Namun hakim harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih seorang anak-anak. Maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum seperti:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Perawatan di Lembaga Penvelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- c) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- d) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Untuk pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversifikasi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijera dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).

Sub-heading of the discussion

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt

Tim. Bagi pelaksana, hakim mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu. Antara lain persyaratan formal dan materiil telah dipenuhi, dan terdakwa tidak keberatan atas tuduhan jaksa, sehingga terbukti sebagai tindak pidana. Pertimbangan hukum merupakan bukti adanya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dakwaan kedua dari dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umur. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, akan tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagaimana suatu perbuatan yang diminta untuk bertanggungjawab berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai pasal 76 D,E Pasal 81 ayat 1,2,3, dan Pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak.

Penulis berpendapat bahwa pertanggung jawaban pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Mengenai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Maka yang dimaksud pasal 76E adalah:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sehingga mengenai penerapan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Conclusion

Dari rumusan masalah, berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dari dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere Jakarta Selatan dan mengikuti pelatihan kerja dengan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS selama 1 (satu) bulan. Apabila sanksi dijatuhkan dalam perkara No. 18/ Pid.Sus-Anak/2020/ PN Jkt Tim dari segi masalah Anak. Tindakan Anak menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban dan keluarga korban, seperti trauma dan penghinaan, yang kemudian terkait dengan penuntutan jaksa. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Tim yaitu menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Karena perbuatan Anak memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul kepada korban yang dilakukan dengan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban yang berstatus anak.

References

- Andi Hamzah, 2015, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Shanty Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 100
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta.